



KORAN	HAL
Haluan	8
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PEMROV SUMBAR RAIH OPINI WTP 10 KALI BERTURUT

Ketua DPRD: Jadikan Motivasi untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar tahun 2021.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sumbar tahun 2021 tersebut diserahkan oleh staf ahli BPK RI Perwakilan Sumbar, Novian Herodwijanto kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (20/5).

Berangkat dari pencapaian tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta Pemprov menjadikan torehan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut tersebut, sebagai motivasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas.

Ia mengatakan, mengapresiasi penilaian BPK atas LKPD tahun 2021 tersebut.

"Ini tentunya merupakan prestasi yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah bersama jajarannya," kata Supardi.

Dia memaparkan bagaimana perjalanan panjang pengelolaan keuangan daerah yang mendapatkan Disclaimer pada tahun 2011. Upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah menunjukkan kenaikan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012, dan naik menjadi WTP sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Supardi mengakui, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih cukup banyak kelemahan yang harus dibenahi.

"Ini tentunya memberikan sinyal kepada pemerintah daerah untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah,"

ujarnya.

Sementara itu Staff ahli Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Novian Herodwijanto menyampaikan, BPK memberikan opini WTP dengan penekanan beberapa hal atas LKPD Pemprov Sumbar tahun 2021.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Sumbar tahun 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan beberapa hal," katanya.

Dia menjelaskan dalam rangka meningkatkan peran BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus berupaya agar laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun ini,



GUBERNUR Sumbar, Mahyeldi, staf ahli BPK RI Perwakilan Sumbar, Novian Herodwijanto, dan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat rapat paripurna penyerahan LHP BPK



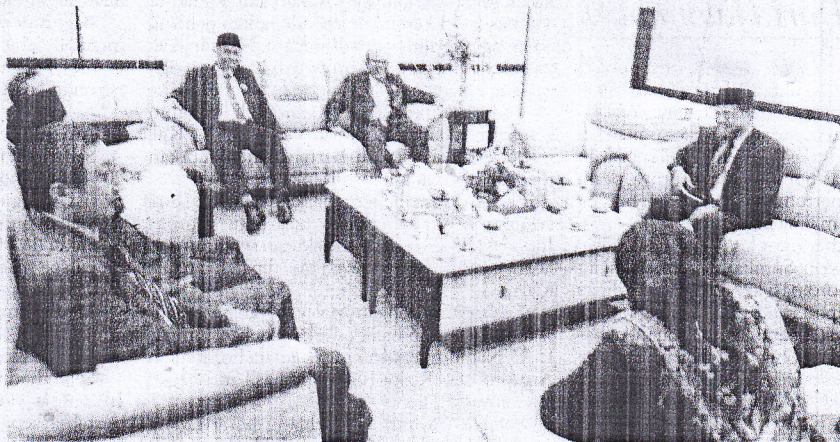
Gubernur, pimpinan DPRD, dan staf ahli BPK RI Perwakilan Sumbar, Novian Herodwijanto berfoto bersama usai penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2021

BPK secara bersamaan melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2021.

Pemeriksaan kinerja ini, bertujuan untuk mengawal salah satu program Prioritas Nasional ke-3, yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan, BPK mengapresiasi upaya Pemprov dalam penanggulangan kemiskinan, namun demikian BPK menemukan beberapa permasalahan yang harus diperbaiki

ke depan. Antara lain Pemprov tidak membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain pada dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat hasil. Kemudian Pemprov Sumbar belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin untuk secara kelompok memanfaatkan atau



TIM dari BPK Perwakilan Sumbar bersama Gubernur Mahyeldi, dan Ketua DPRD Sumbar, Supardi



**SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR**

2 0 2 2

KORAN	HAL
Haluan	8
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Berfoto bersama

mengembangkan aset produktif secara berkelanjutan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan penghargaan dalam bentuk predikat Opini WTP yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh ASN Pemprov Sumbar yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah.

"Kita patut bersyukur, atas prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang diberikan oleh BPK RI, dimana kita berhasil mempertahankan lagi untuk kesepuluh kalinya berturut-turut dari tahun 2012 sampai tahun 2021," ungkapnya bangga.

Di samping itu gubernur memerintahkan bagi seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk menjalankan tugasnya secara optimal, dan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Segera laksanakan tindak

lanjut temuan, pada kesempatan pertama melalui koordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan harus tuntas paling lama enam puluh hari ke depan," katanya.

Ia kembali menegaskan, kepada seluruh staff OPD di lingkup Pemprov Sumbar agar mereview catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI. Sehingga untuk tahun yang akan datang, catatan-catatan tersebut dapat diminimalisir.

"Jika nanti masih ditemukan beberapa catatan-catatan, saya tegaskan segera melaksanakan tindak lanjut temuan, pada kesempatan pertama, melalui koordinasi dengan Inspektorat Provinsi, dan harus tuntas paling lama lima puluh hari," katanya. "Walaupun peluangnya ada enam puluh hari," ulang Gubernur.

Menurut Gubernur hal itu dilakukan demi menuntaskan catatan-catatan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya. Gubernur berharap hal laporan hasil keuangan ini dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan serius, mengingat manfaat LHP ini untuk membantu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan meningkatkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah. (*)